



Nomor : 143/WK/CORSEC/2024

Jakarta, 19 April 2024

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,

Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo|

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPO
atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya
Tahap IV Tahun 2019**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada Kamis, 16 Mei 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Perseroan sampaikan Bukti Iklan Pengumuman RUPO yang telah dilakukan pada Kamis, 18 April 2024 pada Surat Kabar Investor Daily Indonesia sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
- Board of Directors

KB Bank Raih Pinjaman Rp 4,87 Triliun dari KDB

JAKARTA, ID – PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bank) menandatangani fasilitas pinjaman jangka panjang sebesar US\$ 300 juta atau setara Rp 4,87 triliun (kurs Rp 16.235) dari Korea Development Bank (KDB). Pinjaman tersebut guna memperkuat struktur pendanaan di kuartal II-2024 dalam mendukung intermediasi.

Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong menjelaskan, fasilitas pinjaman jangka panjang tersebut diyakini akan semakin memperkuat pendanaan KB Bank. Hal ini mendukung upaya perusahaan dalam melakukan ekspansi kredit, khususnya untuk segmen UMKM dan ritel yang menjadi fokus perseroan di tahun ini.

“Kolaborasi antara KB Bank dengan Korea Development Bank ini turut didukung oleh induk usaha KB Bank melalui jaminan berupa *Standby Letter of Credit* (SBLC) yang diterbitkan oleh KB Kookmin Bank Co., Ltd.,” jelas Robby dalam keterangannya, Selasa (16/4/2024).

Pada tahun ini, kata Robby, KB Bank terus mendorong pertumbuhan bisnis dengan menjadikan segmen *wholesale* sebagai *anchor* dan memperluas ekosistem pada segmen UMKM dan juga ritel.

“Segmen *wholesale* pada 2023 tumbuh hampir 14%, dengan pertumbuhan kredit baru sekitar 18% yang turut didorong pertumbuhan pada Korean Link Business lebih dari dua kali lipat,” jelasnya.

Berdiri sejak 1954, KDB merupakan pilar pembangunan ekonomi di Korea Selatan, yang beroperasi di bawah pengawasan langsung Pemerintah Korea Selatan. Dengan mandat untuk menjaga solvabilitas institusi, KDB telah meraih pengakuan internasional, dengan peringkat seperti Aa2 (Moody's), AA (S&P), dan AA- (Fitch Ratings). Di Korea Selatan, KDB memegang peringkat kredit tertinggi dari Korea Ratings Corp., Korea Investors Services, dan NICE.

Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat posisi keuangan KB Bank, tetapi juga menegaskan komitmen yang berkesinambungan antara KDB dan KB Bank dalam mendorong kemajuan ekonomi. (nid)



Nilai Tukar Rupiah Melemah

Petugas menata uang dolar AS di salah satu gerai penukaran uang asing di Jakarta, Rabu (17/4/2024). Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menembus Rp16.250 ribu per dolar AS pada Rabu (17/4/2024).

Multifinance Siap Hadapi Normalisasi Stimulus Covid-19

JAKARTA, ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) telah siap menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19 terkait penilaian kualitas aset pembiayaan pada 17 April 2024, menyusul perbankan pada akhir Maret lalu. Dengan begitu, sektor PVML utamanya *multifinance* telah menormalisasi kebijakan stimulus tersebut.

Oleh Nida Sahara

Adapun, nilai *outstanding* piutang pembiayaan restrukturisasi Covid-19 hingga Februari 2024 mencapai Rp 6,41 triliun dari 172.150 kontrak. Jumlah ini telah menurun jauh dari angka tertinggi piutang pembiayaan restrukturisasi Covid-19 pada Oktober 2020 sebesar Rp 78,82 triliun dari 2,57 juta kontrak.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) perusahaan pembiayaan juga terus meningkat dari Juni 2020 sampai Februari 2024 ditunjukkan dengan rasio CKPN dibandingkan dengan *non-performing financing* (CKPN/NPF) meningkat dari sebesar 112,60% menjadi 201,78% serta rasio CKPN dibandingkan dengan nilai *financing at risk* (CKPN/FaR) meningkat dari sebesar 33,32% menjadi 50,11%.

OJK menilai apabila kebijakan restrukturisasi

piutang *multifinance* tersebut dihentikan pada 17 April 2024, maka NPF *gross* diproyeksikan hanya sedikit terdampak, yaitu menjadi sekitar 2,48% sampai dengan 2,55%. Per Februari 2024, OJK mencatat NPF *gross multifinance* berada di level 2,55%.

Terkait hal tersebut, Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) I Dewa Made Susila mengatakan, perseroan mendukung langkah OJK dan siap mengakhiri stimulus restrukturisasi tersebut. “Pembiayaan restrukturisasi Covid-19 di Adira Finance terus mengalami penurunan dan saat ini hanya tersisa kurang dari 1% dari total pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi Covid-19,” ujar Made kepada *Investor Daily*, Rabu (17/4/2024).

Di samping itu, Made juga mengaku bahwa sudah tidak ada pengajuan baru restrukturisasi Covid-19 dari nasabah emiten bersandi saham ADMF ini. “Oleh karena itu dengan pencabutan stimulus restrukturisasi Covid-19 sejalan dengan kondisi di Adira Finance,” sambung dia.

Senada, Direktur PT BCA Finance Petrus Karim mengungkapkan bahwa sudah sejak lama perseroan tidak menerima permintaan stimulus Covid-19 dari nasabahnya. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan juga telah lama siap melakukan normalisasi kebijakan tersebut. “BCA Finance siap dan sepakat dengan keputusan OJK untuk mencabut stimulus restrukturisasi,” kata Petrus kepada *Investor Daily*.

Meski demikian, pihaknya tidak menyebut berapa sisa kredit restrukturisasi yang masih ada dalam kebijakan OJK tersebut. Namun, yang pasti perseroan telah menyiapkan

Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

	Des-21	Des-22	Des-23	Feb-23	Feb-24
Piutang Pembiayaan					
● Nominal (Rp T)	364,23	415,86	470,86	428,42	478,69
● Growth (% yoy)	-1,49	14,18	13,23	15,28	11,73
NPF Gross (%)	3,53	2,32	2,44	2,36	2,55
NPF Net (%)	1,16	0,58	0,64	0,60	0,72
Gearing Ratio (x)	1,98	2,07	2,26	2,07	2,22

Sumber: OJK

pencadangan yang cukup sehingga siap melakukan pengakhiran stimulus Covid-19. “Di BCA Finance memang kami sudah lama sejak Covid, sudah tidak ada lagi pengajuan stimulus tersebut. Semoga ke depannya semua berjalan sesuai dengan perhitungan OJK,” sambung Petrus.

Adapun, pemberian stimulus Covid-19 untuk perusahaan sektor jasa keuangan non-bank ini diatur dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 55/KDK.05/2022 tentang Penetapan Kebijakan Relaksasi bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (KDK Perlakuan Khusus) yang merupakan kebijakan stimulus bagi pembiayaan debitur *targeted* yang berstatus sebagai restrukturisasi Covid-19.

KDK Perlakuan Khusus ini merupakan kebijakan relaksasi yang ditetapkan OJK berdasarkan POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

KDK Perlakuan Khusus merupakan kebijakan untuk memperpanjang stimulus Covid-19 lanjutan hingga 17 April 2024 khusus guna mendukung segmen usaha mikro, kecil, dan mene-

ngah (*targeted*). Kebijakan tersebut disertai dengan dorongan kepada pelaku lembaga jasa keuangan sektor PVML untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan, restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan kebijakan stimulus Covid-19 ini merupakan inisiatif OJK yang telah menjadi kebijakan penting dalam mendukung kinerja debitur, sektor PVML, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Industri Siap

Lebih lanjut, Agusman juga mengatakan bahwa dalam menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19, OJK telah melakukan analisis dan pertimbangan yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi makro dan sektoral serta kesiapan sektor PVML, “Khususnya mengenai kenaikan risiko kredit dan daya tahan sektor PVML yang diproyeksikan masih dalam kondisi yang baik,” ungkap

Agusman, Rabu (17/4/2024).

Berakhirnya kebijakan stimulus terkait penilaian kualitas aset bagi debitur dengan usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut telah konsisten mempertimbangkan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, dengan tingkat inflasi yang terkendali dan tumbuhnya investasi serta pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 pada tanggal 21 Juni 2023.

Berdasarkan asesmen indikator kesehatan keuangan pada Februari 2024, sektor PVML di Indonesia dinilai dalam kondisi yang baik. “Hal ini tercermin dari tren piutang pembiayaan restrukturisasi yang terus mengalami penurunan dari sisi *outstanding* dan peningkatan dari sisi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk oleh sektor PVML,” sambung Agusman.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa sektor PVML telah siap untuk mengakhiri periode stimulus Covid-19 secara terkendali (*soft landing*) untuk kembali pada kondisi normal. Selanjutnya, untuk memastikan kelancaran normalisasi kebijakan tersebut, industri PVML tetap dapat melanjutkan restrukturisasi kredit Covid-19 yang sudah berjalan dengan menggunakan ketentuan kualitas aset yang berlaku pada masing-masing jenis industri PVML dalam mengantisipasi penurunan kualitas aset.

“OJK akan secara konsisten melakukan tindakan pengawasan (*supervisory action*) untuk memastikan kesiapan masing-masing industri PVML dalam melaksanakan proses mitigasi risiko dan memenuhi prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya,” pungkas Agusman.

Sinar Mas Multiartha Akuisisi 15% Saham Paramitra

JAKARTA, ID – PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) mengakuisisi 15% saham PT Paramitra Multifinance senilai Rp 60 miliar. Dengan demikian, Sinar Mas Multiartha menjadi pemegang saham terbesar kedua dari perusahaan pembiayaan tersebut.

“Jumlah transaksi pembelian saham tidak melebihi 20% dari ekuitas SMMA, sehingga transaksi tersebut tidak bersifat material,” jelas Direktur Utama Sinar Mas

Multiartha Burhanuddin Abdullah dalam keterangannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (17/4/2024).

Dia menerangkan, transaksi tersebut dilakukan pada 17 April 2024 dan bukan merupakan transaksi afiliasi. Usai transaksi, SMMA mengantongi sebesar 15% saham dari Paramitra Multifinance. Setelah transaksi akuisisi, Paramitra Multifinance mempunyai sederet nama pe-

milik baru. Pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 300.000.000 saham atau mencakup 75,06% adalah Hyundai Capital Service Inc. Disusul PT Sinar Mas Multiartha Tbk 15% atau kepemilikan 60.000.000 saham dan PT Bank Shinhan Indonesia yang mengantongi 9,92% atau 39.700.000 saham.

Dengan akuisisi pihak-pihak terkait, saat ini total 399.700.000 saham dicatatkan Paramitra Multifinance

dengan nominal Rp 399,70 miliar. Bertambah dari sebelumnya hanya sebanyak 300.000.000 saham dengan nominal Rp 300 miliar. Mengacu laman *smma.co.id*, Sinar Mas Multiartha merupakan induk dari perusahaan keuangan terpadu dalam Sinar Mas Unit, yang meliputi *multifinance*, asuransi, pasar modal, jasa administrasi saham, perdagangan dan industri, serta teknologi informasi yang diantaranya adalah *fintech*. (pri)

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHUN 2019

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun 2019 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun 2019 (“RUPU”) di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024.

Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPU tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024.

Jakarta, 18 April 2024

EMITEN

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT

PT BANK MEGA TBK